

# **Dinamika Administrasi**

**Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen**

Volume 2 Nomor 1. April 2019

*Dinamika Administrasi ; Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen (DJAM) merupakan jurnal ilmiah yang menerbitkan artikel orisinal mengenai ilmu pengetahuan, penelitian atau penelitian terapan dan perkembangan lainnya di bidang Ilmu Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Administrasi Pembangunan, Ilmu Administrasi Bisnis, Ilmu Komunikasi, dan rumpun Keilmuan Manajemen. DJAM diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun (Oktober dan April). Target pembaca utamanya adalah peneliti, akademisi, mahasiswa, praktisi dan kalangan lainnya yang tertarik dengan isu Administrasi dan Manajemen*

## **EDITOR IN CHIEF**

**Antonius Galih Prasetyo**

(Lembaga Administrasi Negara)

## **EDITORIAL BOARD**

**Sarpan**

(Universitas Wijaya Putera Surabaya)

**Rangga Restu Prayogo**

(Universitas Negeri Medan)

**Alizar Isna**

(Universitas Jenderal Soedirman)

**Vincentia Ananda**

(Unika Soegijapranata)

**Ertien Rining Nawangsari**

(UPN “Veteran” Jawa Timur)

**David Laiyan**

(Universitas Musamus Merauke)

**Rima Ranintya Yusuf**

(STIA LAN Jakarta)

## **DARI REDAKSI**

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahNya, hingga bulan April 2019 ini Jurnal Dinamika Administrasi telah menerbitkan Volume 2. Nomor 1. Penerbitan Jurnal Dinamika Administrasi, diharapkan dapat menjadikan media untuk mempublikasikan karya ilmiah dosen maupun mahasiswa. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para peneliti atas partisipasinya mengirim karya ilmiahnya berupa artikel untuk dipublikasikan pada Jurnal Dinamika Administrasi.

Bagi penerbitan yang berikutnya Redaksi Jurnal Dinamika Administrasi mengundang para peneliti/penulis untuk mengirimkan artikel-artikel hasil penelitian, dengan mengacu pada format penulisan di halaman sampul belakang jurnal berikut.

Kritik dan saran dari para pemerhati sangat diharapkan demi kemajuan jurnal ini, dan semoga dengan diterbitkannya Jurnal Dinamika Administrasi akan semakin meningkatkan semangat peneliti untuk menulis dan mempublikasikan karya-karya penelitiannya.

Banyumas, April 2019

Tim Editor

## DAFTAR ISI

Dinamika Administrasi Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen  
Volume 2 Nomor 1. April 2019

<b>IMPLEMENTASI E-LEARNING SEBAGAI PENDUKUNG PROSES BELAJAR MENGAJAR BAGI DOSEN DAN MAHASISWA DI UPN “VETERAN” JAWA TIMUR</b> Nuruni IK Wardani, Sishadiyati, dan Zumrotul Fitriyah .....	1
<b>MANAJEMEN PEMBERDAYAAN DALAM TANGGAP DARURAT BENCANA GUNUNG KELUD MENGGUNAKAN METODE PARTICIPATION RURAL APPARSIAL (PRA)</b> Dzakiyah A Hikmah, Johan Vivaldi A.S, Yuni Fatmawati, dan Sherina Aureliza .....	12
<b>PELATIHAN DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI KARYAWAN MEKANIK AUTO 2000 WARU SURABAYA</b> Faruk .....	27
<b>PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KOMUNIKASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SURABAYA</b> Suryati Eko Putro .....	46
<b>PENGARUH IKLIM KERJA DAN TRAINING TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO</b> Miftahul Jannah .....	60
<b>PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI INDONESIA</b> Aditama A Musaddad, Okta Y Rahayu, Erry Pratama, Supraptiningsih, dan Evi Wahyuni .....	73
<b>DUKUNGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) DALAM KEGIATAN MANAJEMEN</b> Rifki Suwaji .....	94

# PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI INDONESIA

<sup>1</sup> Aditama A Musaddad, Okta Y Rahayu, Erry Pratama, Supraptiningsih, dan Evi Wahyuni,

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Negara, UPN “Veteran” Jawa Timur

<sup>1</sup>Jalan Raya Rungkut Madya Surabaya

e-mail: [aditamaazmy@gmail.com](mailto:aditamaazmy@gmail.com)

## ABSTRAK

Sektor Pariwisata diyakini sebagai sector yang mampu sebagai penggerak perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia mulai fokus pada perbaikan dan pengembangan dalam upaya meningkatkan kualitas pariwisata di setiap daerah mnjadi pariwisata yang memiliki dampak berkelanjutan. Peran dari pemerintah, masyarakat dan sector swasta sangat dibutuhkan dalam pengembangan ini. Dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan akan memberikan dampak positif maupun negative. Dampak tersebut berdampak yang signifikan baik bagi Negara maupun masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan perlu memahami pola dan model yang akan digunakan dan dikembangkan dalam peningkatan pariwisata berkelanjutan. Tujuan dari penulisan ini adalah mengidentifikasi definisi, model dan pola pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (literature review) yang merupakan penelitian dilakukan di dalam perpustakaan dan mengkaji literature yang merupakan sumber data primernya. Dari penelitian dan analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia menggunakan Pola Community Based Tourism (CBT) dan 3 model Pendekatan yaitu Pendekatan Pengembangan Local Wisdom Tourism, Pendekatan Pengembangan Desa Wisata dan Pendekatan Pengembangan Kewirausahaan Sosial.

**Kata Kunci :** *pariwisata berkelanjutan, pola dan model pariwisata berkelanjutan*

## PENDAHULUAN

Pariwisata di Indonesia menurut(Undang – Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan) pasal 1 (5) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidangnya. Indonesia kaya wisata bahari yang mempesona, keanekaragaman terumbu karang bawah laut yang memikat wisatawan untuk berkunjung. Hal ini dapat dilihat Indonesia memiliki potensi alam yang sangat besar.

Pembangunan pariwisata saat ini diarahkan kepada pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. hal tersebut karena kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan terarah pada penggunaan sumberdaya alam dan penggunaan sumber daya manusia untuk jangka waktu panjang Sharpley (2000) dalam Budiani, Sri Rahayu. Wahdaningrum, (2018). Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam ras, suku, bahasa dan budaya sehingga banyak negara-negara tetangga yang ingin belajar dan mengenal lebih dekat bagaimana pariwisata Indonesia. Beragam pariwisata yang ditawarkan mulai dari keindahan alam dan budaya dari tiap-tiap daerah dari sabang sampai merauka

seperti Bali dan Lombok, Papua yang telah dikenal dunia karena pesona alamnya dan budaya warga setempat. Pariwisata di Indonesia semakin eksis dan berkembang.

Menurut Siaran Pers Rakornas Kepariwisata ke-IV, 2016 dalam catatan Aisyianita, (2017) Pariwisata diyakini sebagai sektor yang mampu menjadi stimulan penggerak perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hampir seluruh daerah di Indonesia mulai fokus dan berbenah untuk meningkatkan kualitas pariwisata daerah masing - masing. Hal ini sejalan dengan program pembangunan pariwisata nasional yang memiliki target mampu menjaring 20 juta wisatawan mancanegara, 275 juta wisatawan nusantara, dan 13 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2019. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam membuat kebijakan pengembangan pariwisata sehingga baik masyarakat maupun wisatawan dapat mematuhi segala kebijakan dan peraturan yang telah ditentukan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian wisata alam dan budaya di Indonesia.

Pengembangan pariwisata suatu daerah akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak tersebut akan berpengaruh yang signifikan, baik bagi negara tujuan maupun bagi masyarakat lokal Goodwin, (1996) dalam Purnamasari, (2011). Hal tersebut disebabkan oleh perilaku pengusaha yang sebagian besar memonopoli usaha pariwisata baik dalam skala kecil maupun skala besar. Sehingga peran sektor swasta dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan ini juga dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pariwisata yang dapat dikenal berbagai daerah dan negara.

Dalam mewujudkan pengembangan destinasi wisata yang baik diperlukan peningkatan mutu dan kualitas atas destinasi tersebut guna menciptakan citra destinasi yang baik pula dimata pengunjung maupun masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah, pihak pengelola, serta masyarakat perlu memahami tentang komponen destinasi wisata yakni Attraction (atraksi), Accessibility (aksesibilitas), Amenity (aminitas), dan Ancillary (fasilitas tambahan) sebagaimana disebut sebagai 4A. Sehingga apabila keempat elemen telah terpenuhi maka destinasi kepuasan wisatawan terhadap destinasi wisata meningkat dan citra pariwisata juga terbangun (Bagus & Wanda, 2018).

Buqori, (2008) berpendapat bahwa untuk kelancaran pengembangan pariwisata diperlukan beberapa pendorong yang penting antara lain jalan yang baik, transportasi darat, laut, udara, dan akomodasi sebagai sarana yang tak kalah pentingnya dalam

pengembangan pariwisata. Dalam perkembangan objek pariwisata seperti revitalisasi merupakan wujud dari pengembangan pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian pemerintah maupun masyarakat lokal. Supaya menjadi pariwisata berkelanjutan maka seluruh proses dari revitalisasi tersebut harus memperhatikan upaya untuk mengembangkan atau memperbaiki lingkungan sekitar sebagai salah satu upaya pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah bagaimana defisini, model dan pola pembangunan pariwisata berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi definisi, model dan pola pembangunan pariwisata berkelanjutan. Manfaat dari penelitian ini yaitu melatih penulis dalam kemampuan membaca secara lebih efektif dalam menulis artikel ilmiah, melatih penulis dalam meningkatkan kemampuan dalam penyusunan artikel ilmiah, memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan hasil artikel ilmiah ini dapat dijadikan bahan referensi penelitian. Ruang lingkup pada artikel ilmiah ini adalah hanya mencakup pada definisi, pola dan model pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar dapat fokus dalam satu studi kasus, sehingga data yang diperoleh valid, spesifik, mendalam dan memudahkan dalam menganalisis data yang diperoleh.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi yang digunakan yaitu kepustakaan (library research) atau literature review dimana penelitian dilakukan di dalam perpustakaan dan mengkaji literature yang merupakan sumber data primernya (Kuswana, 2011). Pendekatan penelitian menggunakan metodologi studi kepustakaan atau literature review dengan menelaah 2 buku, 3 jurnal internasional, dan 29 jurnal nasional terkait pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hasil dari berbagai telaah literatur ini akan digunakan untuk mengidentifikasi definisi, pola, dan model pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1.1 Strategi dan Indeks Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan**

Pariwisata akan menjadi industry terbesar dengan pertumbuhan yang pesat dalam perekonomian jasa dan akan menjadi penggerak utama ekonomi suatu negara bersama dengan industry telekomunikasi dan teknologi informasi. World Tourism Organization (1998) juga memperkirakan bahwa mobilitas wisatawan

dunia akan mencapai angka 900 juta wisatawan pada tahun 2004, dimana kawasan Asia Pasifik (termasuk Indonesia didalamnya) akan menjadi kawasan tujuan wisata utama yang mengalami pertumbuhan paling tinggi diantara kawasan-kawasan lainnya di dunia.

Hasil penelitian World Travel and Tourism Council (1997), menunjukkan bahwa saat ini pariwisata telah menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi dunia, yaitu mencapai 10,9 persen dari GDP dunia dan menyerap lapangan kerja sebesar 10,7 persen dari jumlah penduduk dunia. Satu dari delapan pekerjaan akan ada di industri pariwisata atau menciptakan sekitar 125 juta kesempatan kerja langsung maupun tidak langsung pada tahun 2005. Oleh karena sedemikian prospeknya industri pariwisata, sehingga banyak negara di dunia yang berpaling dan berlomba membangun industri pariwisatanya untuk ikut ambil bagian dalam kompetisi memperebutkan potensi pasar global yang amat besar.

Menurut Charles Kaiser Jr. Dan Larry E. Helber dalam catatan Rani Maha, (2014) mengatakan bahwa tingkat-tingkat perencanaan pariwisata itu dimulai dari pengembangan pariwisata daerah yang mencakup pembangunan fisik objek dan atraksi wisata. Setelah hal tersebut dilakukan, kita dapat melihat bagaimana perkembangan dari jumlah berkunjung wisatawan apabila ternyata mencapai target yang telah ditetapkan selanjutnya akan memikirkan sistem prioritas sektor pariwisata memerlukan suatu pola perencanaan pengembangan destinasi wisata yang tersusun agar potensi yang dimiliki oleh destinasi wisata dapat dengan optimal dikembangkan. Untuk memajukan sektor pariwisata suatu destinasi maka dibutuhkan peran dari pemerintah daerah sebagai leading sector dalam menentukan perencanaan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah (Badarab, Trihayuningtyas, & Suryadana, 2017).

Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang saat ini diminati banyak orang di berbagai negara untuk berinvestasi salah satunya Negara Indonesia. Oleh karena itu berbagai Negara berlomba-lomba dalam memperbaiki dan mengembangkan pariwisata yang ada di negaranya. Dengan menggunakan pengembangan pariwisata berkelanjutan maka dampak yang ditimbulkan dapat berkelanjutan. Maksudnya adalah dengan adanya kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia maka negara

Indoneisa memiliki modal untuk membranding citra negara dan juga memperkenalkan pariwisata-pariwisata yang ada. Upaya pembangunan pariwisata tersebut perlu kerjasama yang baik antara pihak yang terkait (pemerintah, masyarakat, dan sektor privat) sehingga destinasi wisata dapat dikembangkan dengan optimal. Tiga pilar tersebut merupakan syarat untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang baik.

## 1.2 Konsep Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Menurut Hadinoto (1996) dalam Widodo, (2016) pariwisata dianggap sebagai hal yang memiliki sifat multi dimensi dengan rangkaian dalam proses pembangunan. Pembangunan pariwisata berkaitan dengan masalah sosial, budaya, ekonomi dan politik. Sedangkan Suwena (2010:86) pembangunan destinasi pariwisata atau daya tarik wisata merupakan tempat dimana segala kegiatan pariwisata bisa dilakukan dengan tersedianya segala fasilitas dan atraksi wisata untuk wisatawan. Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama dalam kegiatan sosial dan ekonomi, dalam menghadapi tantangan dan peluang telah dilakukan perubahan peran pemerintah dibidang kebudayaan dan pariwisata yang pada masa lalu berperan sebagai pelaksana pembangunan, saat ini lebih difokuskan hanya kepada tugas-tugas pemerintahan terutama sebagai fasilitator agar kegiatan pariwisata yang dilakukan dapat berkembang dengan pesat. (Sukirno, 2006 dalam Kumala, Muktiyah. Soelistyo, Aris. Nuraini, 2017). Dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah tempat yang bersifat multi-dimensi yang didalamnya berkaitan dengan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Selain itu, pariwisata juga dapat meningkatkan pembangunan suatu daerah.

Hidayat, (2011) berpendapat bahwa *Sustainable Tourism* (pariwisata berkelanjutan) dan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) adalah istilah yang mengakibatkan bermacam-macam tanggapan/respons dari manajer-manajer, perencana-perencana pariwisata serta pembela/advokat lingkungan, baik skeptis sampai yang memperhatikan. Pariwisata berkelanjutan didefinisikan oleh UNWTO sebagai pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan sekarang dan yang akan datang, menjawab kebutuhan pengunjung, industri (pariwisata), lingkungan dan komunitas tuan

rumah (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012). Berdasarkan teori diatas bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu pengembangan pariwisata yang dalam upaya perencanaannya memperhatikan segala kemungkinan yang terjadi, seperti dampak yang akan ditimbulkan, hambatan yang akan muncul, serta cara mengatasi dan mencegah kemungkinan tersebut.

Menurut Noor & Pratiwi, (2016) konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan, yaitu:

1. Melakukan usaha-usaha yang dapat menjamin kelestarian sosial-budaya dan lingkungan hidup yang ada serta melindungi dari hal-hal yang dapat mengancam keberadaannya;
2. Memberikan pendidikan dan pelatihan tentang kepariwisataan kepada masyarakat lokal dan mengikutsertakan mereka dalam proses perencanaan, pengembangan, pelestarian, serta penilaian terhadap pengembangan pariwisata;
3. Menggunakan konsep daya tampung (*carrying capacity*), yaitu membatasi kunjungan wisatawan sesuai dengan kapasitas yang dapat ditampung oleh atraksi wisata tersebut sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal;
4. Memberikan informasi dan pendidikan kepada wisatawan dan juga masyarakat lokal mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya;
5. Melakukan penelitian secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan penyimpangan yang terjadi sehubungan dengan penerapan dari konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Ada 5 prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan yaitu partisipasi, integrasi, pemerataan, keanekaragaman, dan perspektif jangka panjang (Rahadian, 2016). Dalam pembangunan keberlanjutan perlu memperhatikan elemen-elemen pembangunan pariwisata berkelanjutan agar terciptanya pariwisata berkualitas. Selain itu juga dibutuhkan strategi-strategi dalam pengembangannya. Menurut Suryono (2004, hal 80) dalam Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, (2013) strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan: Kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana. Dalam penerapannya terdapat strategi yang mana harus berkaitan dengan tujuan sarana dan cara sehingga dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Dan tentunya juga

implementasi dari strategi tersebut harus sesuai dengan visi misi pembangun pariwisata suatu daerah.

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan konsep yang ideal dalam negara-negara berkembang. Konsep ini digunakan untuk menghadapi tantangan kedepan dalam era globalisasi dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik. Pembangunan pariwisata berkelanjutan harus didukung dengan kebijakan pengembangan pariwisata yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Djafar (2015) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata merupakan upaya pengembangan yang terencana dengan sistematis dan menyeluruh, sehingga manfaat yang ditimbulkan bisa lebih optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural.

Dalam Jurnal (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012) yang berpedoman dari UNWTO mengemukakan bahwa dalam Pembangunan Berkelanjutan terdapat pedoman atau ketentuan yang hendaknya:

1. Memanfaatkan sumberdaya lingkungan yang menjadi elemen kunci dalam pembangunan kepariwisataan secara optimal, menjaga proses ekologi penting dan membantu mengkonservasikan pusaka alam dan keanekaragaman hayati;
2. Menghormati keotentikan sosio-budaya dan komunitas tuan rumah, melestarikan pusaka buatan dan kehidupan budaya masa kini, nilai-nilai tradisional, dan berkontribusi terhadap pemahaman antar budaya dan toleransi; dan
3. Memastikan berlangsungnya operasi jangka panjang, yang memberikan manfaat sosio-ekonomi kepada semua pemangku kepentingan yang terdistribusi secara berkeadilan, termasuk lapangan kerja yang stabil dan peluang komunitas tuan rumah untuk beroleh pendapatan dan pelayanan sosial, serta berkontribusi terhadap penghapusan kemiskinan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan memerlukan partisipasi dari semua pemangku kepentingan yang mendapat informasi, dan juga kepemimpinan politis yang kuat untuk menjamin adanya partisipasi yang luas dan terbangunnya konsensus. Mencapai pariwisata berkelanjutan merupakan proses yang berkesinambungan dan hal itu memerlukan pemantauan dampak secara konstan, mengenalkan tindakan pencegahan dan/atau tindakan korektif bilamana diperlukan. Pariwisata berkelanjutan juga harus menjaga tingkat kepuasan wisatawan yang tinggi dan menjamin pengalaman yang penuh makna bagi wisatawan, menumbuhkan kesadaran tentang isu-isu keberlanjutan dan mempromosikan praktek-praktek pariwisata berkelanjutan di antara mereka.

Menurut Hudson dan Timothy dalam Sunaryo (2013:139) dalam catatan (Rizkianto & Topowijono, 2018) pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* merupakan pelibatan masyarakat dengan kepastian manfaat yang diperoleh oleh masyarakat melalui upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal. serta kelompok lain yang memiliki antusias atau minat kepada kepariwisataan, dengan pengelolaan pariwisata yang memberi peluang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pariwisata berbasis masyarakat berkaitan dengan adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat sebagai pengelola dalam pembangunan kepariwisataan yang ada. Partisipasi masyarakat yang dimaksud ada dua yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam memperoleh keuntungan. Tingkat partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan pariwisata berbasis komunitas. Reid (2003) dalam (Susanto, 2016) juga mengajukan tingkatan partisipasi dalam hal 3 pokok, yaitu *coercive community participation*, *induced community participation*, dan *spontaneous community participation*.

*Coercive community participation* yaitu tingkatan partisipasi paling rendah dimana masyarakat dapat dikategorikan tidak memiliki partisipasi. Dalam tingkatan ini, partisipasi difungsikan sebagai sebuah kesempatan pemimpin atau penguasa dalam memaksakan kehendak. *Induced community participation* merupakan tingkatan menengah dimana masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi ataupun pendapat. Sedangkan tingkatan tertinggi yaitu *spontaneous community participation* dimana masyarakat dapat berpendapat seluas-luasnya spontan dalam penyempaiannya, sehingga partisipasi masyarakat di tingkat ini merupakan tingkat tertinggi partisipasi

Berdasarkan informasi dari jurnal (Purnamasari, 2011) dalam *Guidebook to Tourism Based Community Development* terdapat berbagai indikator untuk penerapan pariwisata berbasis masyarakat. Indikator-indikator penerapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Indikator Penerapan Konsep Community Based Development

Persyaratan Dasar	Kebijakan Dasar	Tolak Ukur
Pengembangan dasar untuk membangun komunitas	Membangun organisasi untuk melayani aktivitas komunitas	Promosi kegiatan pengembangan komunitas
		Memberikan dukungan pada masyarakat lokal
		Menyediakan dasar kegiatan dan informasi yang diperlukan
Menjaga keberlanjutan sumber daya, kepuasan wisatawan, dan lingkungan hidup	Membangun sistem yang berkolaborasi dengan pemerintah	Memberikan usaha-usaha yang terorganisir
		Membangun pengembangan komunitas yang tersistematis
	Menjaga keberlangsungan lingkungan hidup	Konservasi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
		Mendukung kegiatan industrial
		Menciptakan tujuan kehidupan komunitas
	Menjaga keberlangsungan sumberdaya	Terus menggali sumber daya yang ada
		Menjaga nilai-nilai sumberdaya yang ada
		Keseimbangan penggunaan dan perlindungan
	Menjaga kepuasan wisatawan/pengunjung	Penerimaan ( <i>hospitally</i> ) yang lebih baik
		Keberadaan dan penyebaran informasi
		Pengaman lingkungan terutama untuk sarana dan prasarana transportasi
	Membangun system keseimbangan antara lingkungan sekitar, sumber daya, dan kepuasan wisatawan	Membangun sistem informasi, untuk pertukaran dan kolaborasi informasi
Usaha publisias oleh pemerintah		
Membangun sistem pengembalian keuntungan untuk komunitas		Menyisihkan sebagian hasil dari pemasukan pariwisata untuk konservasi lingkungan
Memonitor hasil yang sudah didapat	Kendali dan pengawasan terhadap pencapaian target	

Sumber: USAID (1990) dalam Purnamasari, (2011)

Sebagaimana penyebutan istilah *Community Based Development* (CBD) diatas, jika dibedakan dengan penyebutan istilah *Community Based Tourism* (CBT) maka tidak terdapat perbedaan diantara keduanya karena keduanya memiliki makna yang sama yaitu pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Yaman & Mohd (2004:584-587) dalam (Susanto, 2016) menggarisbawahi beberapa kunci implementasi pembangunan pariwisata dengan pendekatan pariwisata berbasis komunitas, yaitu sebagai berikut:

- a) Adanya dukungan pemerintah: pariwisata berbasis komunitas membutuhkan dukungan struktur yang multi institusional agar sukses dan berkelanjutan. Pendekatan pariwisata berbasis komunitas berorientasi pada manusia yang mendukung pembagian keuntungan dan manfaat yang adil serta mendukung pengentasan kemiskinan dengan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk tetap menjaga SDA dan budaya. Pemerintah akan berfungsi sebagai fasilitator, koordinator atau badan penasehat SDM dan penguatan kelembagaan.
- b) Partisipasi dari stakeholder pariwisata berbasis komunitas didiskripsikan sebagai variasi aktivitas yang meningkatkan dukungan yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Pariwisata berperan dalam pembangunan internal dan mendorong pembangunan aktivitas ekonomi yang lain seperti industri, jasa dan sebagainya.
- c) Ketiga, pembagian keuntungan yang adil. Tidak hanya berkaitan dengan keuntungan langsung yang diterima masyarakat yang memiliki usaha di sektor pariwisata tetapi juga keuntungan tidak langsung yang dapat dinikmati masyarakat yang tidak memiliki usaha.
- d) Keempat, penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan. Salah satu kekuatan ekowisata adalah ketergantungan yang besar pada sumber daya alam dan budaya setempat. Dimana aset tersebut dimiliki dan dikelola oleh seluruh anggota masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, termasuk yang tidak memiliki sumber daya keuangan.
- e) Kelima, penguatan institusi lokal. Pada awalnya peluang usaha pariwisata di daerah pedesaan sulit diatur oleh lembaga yang ada. Penting untuk melibatkan komite dengan anggota berasal dari masyarakat. Tujuan utamanya adalah mengatur hubungan antara penduduk, sumber daya dan pengunjung.
- f) Keenam, keterkaitan antara level regional dan nasional. Komunitas lokal seringkali kurang mendapat link langsung dengan pasar nasional atau internasional, hal ini menjadi penyebab utama mengapa manfaat pariwisata tidak sampai dinikmati di level masyarakat.

Dalam implementasi pembangunan pariwisata dengan pola *Community Based Tourism* semua elemen harus berperan strategis dan berkesinambungan sehingga visi dan misi dari pembangunan pariwisata dapat berhasil dan berdampak berkelanjutan di masa-masa yang akan datang.

Kementerian Perekonomian Bidang Maritim dan Sumber dalam Moerwanto & Pekerjaan, (2017) mengemukakan bahwa terdapat 10 Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KPSN) yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019, yaitu Danau Toba (Sumater Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Pulau Seribu (DKI Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo, Tengger, Semeru (Jawa Timur),

Mandalika (NTB), Labuhan Bajo Komodo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara). Dari 10 KSPN diatas, semuanya menggunakan Pendekatan *Community Based Tourism* (CBT)

Berdasarkan beberapa jurnal yang ditelaah, ditemukan pola dan model pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia yang telah diterapkan di berbagai daerah dan peneliti akan mengaitkan dengan pedoman dari UNWTO tentang pedoman dan praktik Penerapan Pariwisata Berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan menggunakan Pola *Community Based Tourism* (CBT) dan 3 model Pendekatan yaitu Pendekatan Pengembangan *Local Wisdom Tourism*, Pendekatan Pengembangan Desa Wisata dan Pendekatan *Socioprenurship*.



Gambar 1. Pendekatan Pola *Community Based Tourism*

#### A. Pendekatan Pengembangan *Local Wisdom Tourism*

Hindersah, Asyiwati, Akliyah, & Ramadhan, (2017) mengemukakan bahwa telah banyak berkembang beberapa model atau konsep pembangunan berbasis masyarakat. *Community Economic Development* (CED) sebagai salah satu model pembangunan berbasis masyarakat telah dipraktikan sejak tahun 1970-an. Menurut Shragge, CED menawarkan peran untuk membangun banyak alternatif kegiatan ekonomi juga kekuatan masyarakat.

Keberagaman pariwisata Indonesia dan pariwisata berbasis sejarah merupakan komponen di bidang pengembangan kepariwisataan yang saat ini makin gencar dilakukan karena pertimbangan bahwa setiap daerah memiliki sejarah yang berbeda dan unik yang tidak dimiliki daerah lain (Mackellar, 2006) dalam Amalia & Purwaningsih, (2016).

Menurut Sutarso, (2012) dalam Bakti, Sumartias, Damayanti, & Nugraha, (2018) kecenderungan bidang pariwisata masa depan bersumber dari potensi budaya dan kearifan lokal, sehingga gagasan tentang pola

pengembangan wisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik wisata yang lebih estetis (*edipeni*) dan etis (*adiluhung*) perlu didukung.

(Arcana & Wiweka, 2015) berpendapat bahwa pengembangan pariwisata di Indonesia bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, mengembangkan budaya, meningkatkan citra bangsa, dan memperkuat hubungan dengan negara lain. Seperti yang telah dirumuskan oleh (Sutawa, 2013) Bali sebagai tujuan wisata terkemuka di Indonesia mampu meningkatkan kesejahteraan penduduknya dari sektor pariwisata, namun dalam pengembangan pariwisata ada banyak hal yang harus diperhatikan untuk mencapai pariwisata Bali yang berkelanjutan di masa depan. Jadi dalam upaya mengembangkan pariwisata, perlu untuk memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sebagai bagian dari industri pariwisata melalui penerapan konsep Manajemen Acara Berkelanjutan. Sehingga dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dapat diatasi.

Terdapat dua pendekatan dasar dalam melakukan gabungan kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata yang dikemukakan oleh Walker, (1996) dalam Tamaraitka & Rosyidie, (2019) yaitu:

1. *Buying product* dengan memasukkan unsur kearifan lokal dalam produk wisata yang dapat dinikmati seperti souvenir dan kuliner.
2. *Buying experience* dengan menggabungkan unsur kearifan lokal dalam kegiatan yang dapat memberikan pengalaman langsung.

Pariwisata berbasis kearifan local seyogyanya diperhatikan karena didalamnya terdapat potensi yang besar untuk dikembangkan karena pada dasarnya setiap daerah memiliki kearifan lokal yang unik dan khas. Berikut contoh beberapa daerah yang menggunakan pendekatan pengembangan *local wisdom*:

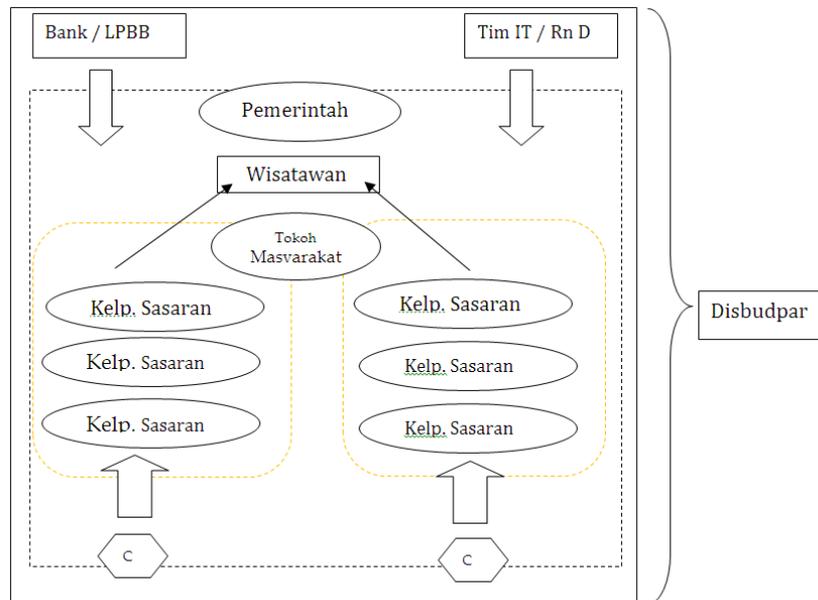
1. Kota Semarang salah satu contohnya. Terdapat beberapa objek andalan di kawasan Kota Semarang yang terkenal diantara para wisatawan domestik maupun asing. Objek ini diantaranya adalah Candi Gedong Songo, Lawang Sewu, Kampung Kopi Banaran, dan masih banyak lagi

objek yang berada di kawasan Kota Semarang yang sangat menarik dikenalkan ke khalayak umum sebagai daerah wisata.

2. Bersumber dari jurnal (Yanuar, 2018) contoh lain pariwisata yang menggunakan pendekatan ini yaitu Geopark Ciletuh yang terletak di sebelah Tenggara Teluk Pelabuhan Ratu mempunyai luas wilayah sekitar 3.900 km<sup>2</sup>. Geopark ini dibatasi oleh pesisir pantai berpasir putih yang menghadap ke arah Teluk Ciletuh dan Lautan Samudra Hindia. Geopark Ciletuh yang sebagian kecil berada di wilayah administratif Desa Ciwaru adalah satu situs geologi yang sangat istimewa karena mempunyai keragaman komposisi batuan purba paling tua di Jawa Bara. Dari aspek geologi, kawasan Geopark Ciletuh ini merupakan fosil tektonik yang memperlihatkan adanya pendampingan dua zona yang disusun oleh batuan berasal dari lempeng samudera yaitu Lempeng Indo-Australia dan lempeng benua yaitu lempeng Eurasia. Dua penggalan kerak bumi ini sangat berbeda sifatnya yang terbentuk karena adanya subduksi dari kedua lempeng. Lempeng Indo-Australia berkomposisi basal yang bersifat basa, sedangkan Lempeng Eurasia berkomposisi granit yang bersifat asam. Namun kawasan ini dikenal rawan gerakan tanah dan bencana tsunami. Kondisi geologi ini dapat dikatakan sangat langka dan unik. Dengan demikian, Geopark Ciletuh ini menyimpan sejarah dan kekayaan alam yang luar biasa tidak ternilai. Sebenarnya Negara Indonesia mempunyai banyak kekayaan keragaman geologi yang tinggi yang layak untuk dikonservasi sebagai warisan geologi. Keuntungan lingkungan, ekonomi dan budaya akan tercipta bila pengembangan kawasan warisan geologi dalam bentuk geopark ini melibatkan masyarakat lokal. Geopark atau Taman Bumi ini telah berhasil dipraktikkan di negara Cina, Jepang dan Malaysia. Sudah sepantasnya Indonesia mendaftarkan situs-situs geologi nya ke dalam Global Geopark Network (GGN) Unesco, sebuah organisasi Jaringan Geopark Dunia untuk dikonservasi sebagai warisan geologi. Keuntungan lingkungan, ekonomi dan budaya akan tercipta bila pengembangan kawasan warisan geologi dalam bentuk geopark ini

melibatkan masyarakat lokal. Pembangunan kawasan sekitar Geopark sebagai destinasi pariwisata dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah dan masyarakat setempat dan akan mendorong pembangunan desa-desa sekitarnya. Walau demikian, sebagaimana destinasi pariwisata yang telah berkembang.

3. Kemudian dalam jurnal (Christiani & Adikampana, 2014) ada pariwisata Tahura Ngurah Rai di Bali memiliki potensi yang meliputi bentang alam dan pemandangan, potensi keanekaragaman jenis mangrove dan potensi sosial-budaya.
4. Jurnal (Rani Maha, 2014) mengkaji tentang pariwisata di Sumenep yang menggunakan pola pendekatan kluster. Amalia & Purwaningsih, (2016) mengatakan bahwa telah didapatkan pola untuk mengembangkan kearifan wisata lokal menjadi paket wisata digunakan sistem kluster. Berikut adalah contoh model yang telah dibuat Sulaeman (2006) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dalam pengembangan kluster kearifan wisata lokal.



5. Dalam jurnal (Dias Satria, 2009) tentang Pulau Sempu dengan pengembangan ekosistem.

Keahlian dalam menggali dan mengembangkan nilai seni tradisional dan kreatifitas banyak dimiliki oleh penduduk lokal dengan naluri dan bakat

alami mereka (*nature and culture*). Ekowisata, industri kreatif, dan kearifan lokal merupakan “The Golden Triangle” dalam kontribusi pariwisata bagi pembangunan pedesaan, konservasi, dan pembangunan berkelanjutan (Mastika, 2018). Dapat dikatakan bahwa ketiga elemen diatas merupakan elemen yang dapat memberikan dampak positif jika mampu dijalankan dengan baik, begitupun sebaliknya, jika tidak mampu dijalankan dengan baik maka akan memberikan dampak yang negatif.

## **B. Pendekatan Pengembangan Desa Wisata**

Pendekatan ini telah digunakan oleh beberapa daerah dengan menelaah beberapa jurnal tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan. Prasetyo & Sulistyarso, (2017) mengemukakan bahwa pendekatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Desa wisata dikonsept dengan menyediakan paket wisata, meningkatkan sarana dan prasarana daerah berupa penyediaan penginapan *homestay* yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan, memperluas usaha kreatif atau UKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan wisata karena peran aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan sesuai dengan konsep Community Based Tourism.

Keberhasilan pengembangan pariwisata di destinasi wisata tergantung pada peran atau partisipasi pemangku kepentingan pariwisata di daerah tersebut. Antara para pemangku kepentingan pariwisata, yaitu masyarakat setempat, pemerintah, dan investor di desa ini telah terlibat aktif dan langsung dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang bersumber dari jurnal (Suniastha Amerta, 2019). Dari kedua teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam upaya pengembangan pariwisata berbasis desa wisata harus adanya kerjasama yang baik antara para pihak yang terkait dengan memperhatikan potensi budaya maupun alam yang dapat dikembangkan di daerah tersebut dalam upaya mengembangkan pariwisata berbasis desa wisata.

Dalam pengembangan produk wisata, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keaslian;
- b. Keterlibatan Masyarakat;

- c. Tradisi Masyarakat Setempat;
- d. Nilai kearifan lokal;
- e. Konservasi dan Daya Dukung.

Rizkianto & Topowijono, (2018) mengemukakan bahwa desa wisata dapat dibentuk melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu melalui inisiatif masyarakat lokal (bottom-up) yaitu terbentuk atas kesadaran dari masyarakat lokal yang ingin berperan aktif dalam pengembangan potensi desa wisatanya dan inisiatif dari pemerintah atau instansi (top-down) yaitu terbentuk melalui penilaian oleh instansi berdasarkan potensi dan tingkat kesiapan desa. baik dari sisi kesiapan wilayah maupun masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata di desanya. Namun, seharusnya dalam pengembangan desa wisata, baik bottom-up maupun top-down perlu berperan strategis, berkolaborasi dalam pengembangan potensi desa wisatanya.

Berikut beberapa daerah yang menggunakan pendekatan pengembangan desa wisata antara lain:

1. Dalam jurnal (Hidayat, 2011) dalam penelitiannya yang mana studi kasusnya adalah Pantai Pangandaran. Dalam pengelolaan usaha objek dan daya tarik wisata (atraksi wisata) yang berbasis masyarakat di tiap desa penyediaan sarana wisata seperti homestay, cottage, restoran, penjualan.
2. Dalam jurnal (Noor & Pratiwi, 2016) tentang Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kampung Buyut Cipageran (Kabuci) Kota Cimahi.
3. Dalam jurnal (Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, 2013b) Studi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk dengan pengembangan objek wisata yang dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk antara lain wisata alam Air Terjun Sedudo, Air Merambat Roro kuning, Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL), dan yang terakhir Goa Margo Tresno.
4. Dalam jurnal (Buqori, 2008) tentang pariwisata Gunung Kelud dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
5. Dalam jurnal (Kristiana & Theodora, 2016) studi kasus Kampung Doha Terpadu Juhud dengan pengembangan agro wisata.

6. Dalam jurnal (Badarab et al., 2017) tentang Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kepulauan Togean Provinsi Sulawesi Tengah
7. Dalam jurnal (Purnamasari, 2011) studi kasus kampung ToddaBojo, Sulawesi Selatan dengan pendekatan pengembangan masyarakat.
8. Pariwisata Desa Kuta yang dilakukan oleh Komunitas AMAN merupakan salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, hal itu meliputi: program pengembangan destinasi pariwisata, program pengembangan pemasaran pariwisata, dan program pengembangan kemitraan.
9. Dalam jurnal (Kurniawan, 2015) tentang Pariwisata Umbul Sidomukti yaitu masyarakat sekitar memanfaatkan situasi ini untuk berdagang, jasa tourleader hingga menjadi karyawan objek pariwisata Umbul Sidomukti, peningkatan pengunjung pasca renovasi Objek Pariwisata Umbul Sidomukti benar-benar mampu meningkatkan pengunjung dan mempengaruhi peningkatan pendapatan, pembangunan Umbul Sidomukti berhasil menyerap banyak tenaga kerja mengingat banyak wahana baru yang disediakan, pembangunan Objek Wisata Umbul Sidomukti benar-benar mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.

Sesuai dengan basis pengembangan agrowisata berbasis masyarakat yang dikemukakan oleh Budiasa (2011:4) dalam (Kristiana & Theodora, 2016) bahwa sumber daya, terutama lahan yang dimiliki secara individual dapat diserahkan pengelolaannya kepada kelompok atau pihak manajemen yang ditentukan dengan imbalan keuntungan yang proporsional. Pendapatan dari aktivitas agrowisata, seperti yang bersumber dari penjualan atraksi, homestay, dan penyediaan makanan dapat diakumulasi dan didistribusikan secara proporsional sebagai tambahan pendapatan usaha secara individual. Proses diatas jika mengambil dari istilah manajemen asset seperti proses lelang (*open tender*), maksudnya adalah dalam proses pengembangan agrowisata berbasis masyarakat memberikan pengelolaannya kepada pihak yang bersangkutan.

Secara keseluruhan pendekatan pengembangan desa wisata menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*) dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek. Tetapi disisi lain pendekatan ini masih terdapat kelemahan-kelemahan yaitu masyarakat desa yang masih minim akan pengetahuan dan ketrampilan bagaimana mengelola desa wisata dikarenakan kurangnya pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan tentang pengembangan pariwisata.

### **C. Pendekatan Pengembangan Sociopreneurship**

Pendekatan *sociopreneurship* atau kewirausahaan sosial ini terdapat di D.I.Yogyakarta. Dalam Jurnal Revi Agustin Aisyianita, (2017) menjelaskan tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan kewirausahaan sosial yang mana prinsip kewirausahaan sosial pada dasarnya hampir mirip dengan prinsip pariwisata berkelanjutan, dimana tujuan utamanya adalah untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar. Kegiatan sociopreneur merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan karena dalam penerapannya, sociopreneur tidak hanya memperhatikan keuntungan secara ekonomis namun juga sangat memperhatikan keuntungan sosial dan lingkungan. Beberapa organisasi *sociopreneur* pariwisata di D.I.Yogyakarta antara lain adalah: Gunung Api Purba Nglanggeran, Difa City Tour dan House of Lawe yang memiliki peran penting dalam kegiatan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Yogyakarta.

Pengembangan *sociopreneurship* menekankan pada aspek modal sosial, inovasi, aktivitas ekonomi, dan transformasi. Namun dalam penerapannya terdapat beberapa hambatan yaitu tantangan awal yang dihadapi oleh pelaku kewirausahaan sosial bidang pariwisata terletak pada permasalahan pendanaan. Seiring berjalannya waktu, permasalahan terkait finansial tidak lagi menjadi tantangan utama karena profit yang diperoleh sudah cukup besar. Tantangan selanjutnya adalah terkait tentang ketersediaan

sumberdaya manusia yang professional dan terlatih. Kegiatan pelatihan dipilih sebagai sebuah solusi untuk mengatasi tantangan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pedoman dari UNWTO tentang pedoman dan praktik Penerapan Pariwisata Berkelanjutan sebagaimana 3 pedoman dan/atau ketentuan yang telah dikemukakan bahwa Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia telah melaksanakan pedoman-pedoman tersebut. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu pengembangan pariwisata yang dalam upaya perencanaannya memperhatikan segala kemungkinan yang terjadi, seperti dampak yang akan ditimbulkan, hambatan yang akan muncul, serta cara mengatasi dan mencegah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Pembangunan Pariwisata berkelanjutan di Indonesia menggunakan Pola Community Based Tourism (CBT) dan 3 model Pendekatan yaitu Pendekatan Pengembangan Local Wisdom Tourism, Pendekatan Pengembangan Desa Wisata dan Pendekatan Pengembangan Sociopreneurship tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yaitu minimnya sosialisasi dari pemerintah/instansi terkait sehingga pengetahuan dan wawasan dari masyarakat masih rendah dalam pengelolaan pariwisata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyianita, R. A. (2017). Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di D. I. Yogyakarta Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Media Wisata*, 15(2), 608–618.
- Amalia, U. T., & Purwaningsih, E. (2016). Local Wisdom Tourism Development of Semarang With Tourism Cluster System As an Action for Sustainable Economics Development. *Proceedings of Education and Language International Conference*, I(1), 871–879.
- Arcana, K. T. P., & Wiweka, K. (2015). The Impact of Managing Sustainable Event and the Contribution to the Formation of Destination Image at Nusa Dua Resort, Bali. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 6(1), 43–48.
- Badarab, F., Trihayuningtyas, E., & Suryadana, M. L. (2017). Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Di Kepulauan Togean Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah. *Tourism and Hospitality Essentials Journal*, 7(2), 97–112. <https://doi.org/25-81-1-PB>
- Bagus, I., & Wanda, K. (2018). Kepuasan Pengunjung ( Survei pada Pengunjung Situs Trowulan ). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 55(3), 83–91.
- Bakti, I., Sumartias, S., Damayanti, T., & Nugraha, A. R. (2018). Pengembangan Model Komunikasi Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kawasan Geopark

- Pangandaran Development of Local Tourism Based Tourism Communication Model. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 217–230.
- Budiani, S. R., Wahdaningrum, W., Yosky, D., Kensari, E., Pratama, H. S., Mulandari, H., ... Kusmiati, Y. (2018). Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas di Desa Sembungan, Wonosobo, Jawa Tengah. *Majalah Geografi Indonesia*, 32(2), 170–176. <https://doi.org/10.22146/mgi>.
- Buqori, I. S. (2008). Potensi Gunung Kelud Sebagai Daya Tarik Wisata Kabupaten Kediri (Universitas Sebelas Maret). Retrieved from [perpustakaan.uns.ac.id](http://perpustakaan.uns.ac.id)
- Christiani, B. W., & Adikampana, I. M. (2014). Potensi dan Strategi Pengembangan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai Sebagai Produk Ekowisata. *Jurnal Destinasi Wisata*, 2(1), 91–101.
- Dias Satria. (2009). Strategi Pengembangan Ekowisata. *Journal Of Indonesian Applied Economics*, 3(Mei), 37–47.
- Djafar, S. (2015). Evaluasi Kebijakan Pariwisata (K. Nugrahini, Ed.). Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hidayat, M. (2011). Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat). *Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal*, 1(1), 33–44. Retrieved from [file:///C:/Users/AXIOO/Downloads/1879-3318-1-SM\(2\).pdf](file:///C:/Users/AXIOO/Downloads/1879-3318-1-SM(2).pdf)
- Hindersah, H., Asyiwati, Y., Akliyah, L. S., & Ramadhan, T. A. (2017). Tantangan Pembangunan Pariwisata Inklusif Geopark Ciletuh, Desa Ciwaru Kabupaten Sukabumi – Provinsi Jawa Barat. 125–134.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2012). Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs untuk Indonesia (Vol. 1). Jakarta: ILO Country Office.
- Kristiana, & Theodora, S. (2016). Strategi Upaya Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Agrowisata Berbasis Masyarakat Kampung Domba Terpadu Juhut, Provinsi Banten. *Jurnal Ilmiah Widya*, 3(3), 1–7.
- Kumala, M., Soelistyo, A., & Nurani, I. (2017). Analisis Potensi Sektor Pariwisata Sebagai Sektor Unggulan di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 474–481.
- Kurniawan, W. (2015). Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Pariwisata Umbul Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *Edaj*, 1(1), 1–14. [https://doi.org/10.1016/S0301-7036\(14\)70862-4](https://doi.org/10.1016/S0301-7036(14)70862-4)
- Kuswana, D. (2011). Metode Penelitian Sosial (1st ed.; B. A. Saebani, Ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mastika, I. K. (2018). Pengembangan Ekowisata Berwawasan Kearifan Lokal di Wilayah Eks Karesidenan Besuki, Jawa Timur. *JUMPA*, 4(2), 240–252.
- Moerwanto, A. S., & Pekerjaan, K. (2017). Strategi Pembangunan Infrastruktur Wisata Terintegrasi. *Jurnal HPJI*, 3(2), 67–78.
- Noor, A. A., & Pratiwi, D. R. (2016). Konsep Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kampung Buyut Cipageran (Kabuci) Kota Cimahi. *JURNAL 7th Industrial Research, Workshop, and National Seminar.*, 178–183.
- Prasetyo, H., & Sulistyarso, H. (2017). Arah Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. *Jurnal Teknik ITS*, 6(2), 6–9. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i2.26034>

- Purnamasari, A. M. (2011). Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Regional and City Planning*, 22(1), 49–64. Retrieved from <http://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/view/4133>
- Rahadian, A. H. (2016). Strategi Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI*, III(01), 46–56. <https://doi.org/2355-2883>
- Rani Maha, D. P. (2014). Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang). *Jurnal Politik Muda*, 3(3), 412–421.
- Rizkianto, N., & Topowijono. (2018). Penerapan Konsep Community Based Tourism dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan (Studi Pada Desa Wisata Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 58(2), 20–26. Retrieved from <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2402>
- Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, R. (2013a). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah. *Administrasi Publik*, 1(4), 135–143.
- Suniastha Amerta, I. M. (2019). The Role of Tourism Stakeholders at Jasri Tourism Village Development, Karangasem Regency. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 20–28. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v1n2.32>
- Susanto, I. (2016). Perencanaan Pembangunan Pariwisata di Daerah (Studi Pelaksanaan Program pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(4), 227–235.
- Sutawa, G. K. (2013). Issues on Bali Tourism Development and Community Empowerment to Support Sustainable Tourism Development. *Procedia Economics and Finance*, 4(Icsmed), 413–422. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(12\)00356-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00356-5)
- Tamaraitka, F., & Rosyidie, A. (2019). Inkorporasi Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata di Lingkungan Pantai. *Jurnal Sositologi*, 16(1), 125–133.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata. , 9 §.
- Widodo, N. (2016). Perencanaan Pembangunan Pariwisata di Daerah (Studi Pelaksanaan Program pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(4), 227–235.
- Yanuar, Y., Anna, Z., Rosana, M. F., Rizal, A., Sudrajat, A., & Zakaria, Z. (2018). Palabuhan Ratu Dalam Perspektif Infrastruktur Sustainable Development of Geopark National Ciletuh-Palabuhanratu in the Infrastructure Perspective. *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, 10(1), 64–76.